

LETTER C SEGERA URUS SERTIPIKAT Cari Solusi Pengelolaan Tanah Wakaf

PENGASIH (KR) - Permasalahan dalam pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf pasti ada. Namun semua permasalahan pasti ada solusinya. Syaratnya harus mau membangun sinergi, komunikasi, koordinasi, dan kerja sama.

Adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang masih Letter C, maka segera mendapatkan sertipikat.

Kepala Kankemenag Kulonprogo HM Wahib Jamil SAg MPd menuturkan hal itu di sela-sela menghadiri Rakor Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Rumah Makan Langgengsari Mbulu Pengasih, Kamis (2/3). "Untuk mencari solusi diperlukan adanya sinergi, koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antara Kemenag dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga hadir adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf.



Rakor Badan Wakaf Indonesia Kulonprogo.

Program ini diharapkan tanah wakaf dapat segera diproses dan cepat mendapatkan sertipikat. Sehingga tanah wakaf akan dapat terlindungi secara hukum," ujar Jamil.

Pernyataan itu diperkuat oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Haris Widiyanto SH. Diharapkan Haris adanya kerja sama dari para Nazhir, baik dari NU, Muhammadiyah, maupun Perorangan. "Mohon kerjasamanya dari para Nazhir

untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah wakaf. Terutama segera mendaftarkan ke KUA selanjutnya ke BPN. Dengan harapan agar tanah wakaf tersebut bisa segera mendapatkan sertipikat," pinta Haris.

Sementara narasumber dari Kantor Pertanahan Kulonprogo, Ismanto Abdul Kadir APTnh menyampaikan tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf.

(Wid)

2 Balon Anggota DPD DIY Ikuti Perbaikan

WATES (KR) - KPU Kabupaten Kulonprogo telah menyelesaikan tahapan verifikasi faktual pendukung calon anggota DPD. Hasil dari Rekapitulasi menunjukkan bahwa syarat minimal pendukung sejumlah minimal 2000 dari 2 bakal calon atas nama Ir Cinde Laras Yulianto dan Sindu Kurniawan SE dinyatakan belum memenuhi syarat.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan selama 20 hari yaitu dari 6-26 Februari 2023.

Jumlah sampel yang diverifikasi faktual untuk Kabupaten Kulonprogo berjumlah 1.854 pendukung. Rincian sampel masing-masing calon adalah sebagai berikut A. Khudhori 137, Dr H Hilmy Muhammad 297, DR H Tugiman SH MSI 0, Drs Trisno

Sunardi 87, Gusti Kanjeng Ratu Hemas 298, Ir Ahmad Syaqui Soeratno MM 204, Ir Cinde Laras Yulianto 141, RA Yashinta Sekarwangi Mega 236, dan Sindu Kurniawan SE 184.

"Kita sudah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual pada Selasa (28/2) dengan mengundang Bawaslu dan Penghubung dari bakal calon anggota DPD. Kemudian hasil rekapitulasi tingkat kabupaten direkap di tingkat KPU DIY pada 1 Maret 2023," ujar Ketua Divisi II Tri Mulatsih SPd MA, Jumat (3/3).

Hasil dari Rekapitulasi menunjukkan bahwa syarat minimal pendukung sejumlah minimal 2000 dari 2 bakal calon atas nama Ir Cinde Laras Yulianto dan Sindu Kurniawan SE dinyatakan belum memenuhi syarat.

(Wid)

BENCANA HIDROMETEOROLOGI 2 Bulan, Terjadi 240 Longsor dan Angin Kencang

WONOSARI (KR) - Dampak cuaca ekstrem di Kabupaten Gunungkidul selama 2 bulan terakhir berdampak terjadinya bencana alam hidrometeorologi yang menimbulkan korban jiwa dan harta.

Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Sumadi mengatakan, dari bulan Januari hingga awal Maret 2023 tercatat sebanyak 240 kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul. Mulai dari tanah longsor, puting beliung dan banjir yang mengenangi rumah warga.

"Terbanyak menimpa

bangunan rumah dan fasilitas umum akibat longsor," katanya Jumat (3/3).

Lokasi kebencanaan yang terjadi hampir merata di 18 kapanewon dan titik kebencanaan di beberapa lokasi kejadian bencana sering kali terjadi berulang.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Kapanewon Gedangsari merupakan daerah terparah

atas dampak bencana dan di wilayah initerjadi tebing yang longsor hingga menutup akses jalan. Bahkan hingga saat ini ada salah satu lokasi terdampak bencana longsor yang belum dilakukan penanganan maksimal karena terdapat beberapa pertimbangan. Mulai dari tanah yang masih labil dan lainnya.

Karena intensitas hujan madih tinggi untuk kesesiapaan masih terus disiapkan termasuk logistik, peralatan, dan bantuan rehab rekon bagi warga terdampak. "Mengenai anggaran untuk kebencanaan kami berkoordinasi

nasi dengan lintas sektoral untuk penanganan jangka pendek serta jangka panjang," imbuhnya.

Koordinasi dengan lintas sektoral tersebut khususnya untuk penanganan kategori berat. Seperti terjadi di Kapanewon Gedangsari itang merupakan wilayah terparah terkena dampak bencana.

Dalam hal ini koordinasi dilakukan dengan DPUPRPK terkait penanganan kawasan yang membutuhkan penanganan dengan alat berat. "Saat ini masih ada satu titik longsor yang belum bisa ditangani maksimal," ujarnya. (Bmp)

Ditargetkan 25 Presen KTP Digital Terlayani

WONOSARI (KR) - Meskipun pencanangan kartu tanda penduduk (KTP) digital baru saja diloucing pemerintah pusat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul Ruspamilu Yulianta SE, Jumat (3/3).

Targetnya tahun 2023 ini 25 penduduk Gunungkidul sudah mempunyai mengubah e KTP menjadi KTP digital "Beberapa hari ini petugas Dukcapil melayani di Toko Serba Ada (Toserba) Sambipitu (Patuk) dan Rumah Sakit Panti Rahayu Karang-

mojo," kata Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul Ruspamilu Yulianta SE, Jumat (3/3).

Dinas Dukcapil sedang melaksanakan kegiatan pelayanan aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pelayanan aktifasi IKD dilaksanakan di beberapa Dinas Instansi Pemerintah Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan secara berkala.

Ke depan seluruh masyarakat diharapkan memiliki Identitas Kependudukan Digital. Adapun persyaratannya, memiliki android minimal seri 8 dan KTP elektronik.

Masyarakat dianjurkan untuk mengunduh atau



KR-Endar Widodo
Ruspamilu Yulianta

download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di playstore pada android masing masing, satu android hanya bisa untuk aktifasi satu IKD.

Untuk mengaktifkan, masyarakat cukup datang ke kapanewon terdekat atau Dinas Dukcapil untuk mengaktifkan IKD.

Atau bisa juga dilakukan aktifasi saat petugas dari Dinas Dukcapil melakukan pelayanan ke masyarakat.

Dengan adanya IKD ini didalamnya seluruh data pribadi dari masyarakat bisa dilihat dan hanya yang bersangkutan yang bisa membuka karena setiap akan melihat atau membuka data harus menggunakan PIN atau password yang hanya di ketahui oleh pemilik android tersebut.

Harapan dari kepala dinas Dukcapil Gunungkidul untuk tahun ini bisa mencapai target 25 persen dari jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik melakukan IKD sesuai target yang di berikan oleh Dirjend Dukcapil.

(Ewi)

BUPATI SIDAK DI UMBULREJO Saat Perangkat Sibuk Cek Berkas SPPT

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong, beberapa hari lalu. Lurah dan aparat kalurahan yang sedang sibuk mengecek Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tersebut agak kaget. Sebelumnya tidak ada informasi kedatangan bupati. Bupati yang hari itu ada kegiatan di Kapanewon Ponjong secara mendadak ingin bertemu dengan aparat kalurahan di Umbulrejo. Untuk melihat kinerja dan mendengarkan masukan dari perangkat. Bupati memberikan apresiasi atas kegiatan perangkat kalurahan. Kalurahan memang salah satu ujung tombak dalam kelancaran pembayaran pajak dengan menyampaikan SPPT kepada wajib pajak. "Teruslah bekerja keras disiplin jaga kondosivitas masyarakat," kata Bupati Gunungkidul H Sunaryanta dalam arahan-



KR-Endar Widodo
Bupati sidak di Balai Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong.

nya.

Lurah Wakimin yang menyambut kedatangan bupati, memberikan beberapa informasi kegiatan perangkat kalurahan selama jam kerja. Setiap hari pemerintah kalurahan sudah menyusun agenda kegiatan yang akan dilakukan. Termasuk pada saat kunjungan bupati melakukan pengecekan dokumen SPPT untuk memastikan semua wajib pajak di kalurahan tersebut sudah menerima, sesuai dengan data yang ada.

Dalam kesempatan tersebut Wakimin memberikan laporan ringkas kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang ada di kalurahan Umbulrejo, serta menyampaikan harapan-harapan agar pemerintah kabupaten dapat menambah beberapa fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta beberapa sarana dan prasarana yang belum dapat dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBK).

(Ewi)

PENILAIAN RASIONALISASI FISKAL Pemkab Gunungkidul Diminta Hemat Anggaran

WONOSARI (KR) - Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah meminta Kabupaten Gunungkidul berhemat dan merasionalisasi anggaran. Permintaan rasionalisasi tersebut karena terjadi defisit anggaran yang dimiliki pemkab terlalu tinggi. Sesuai dengan PMK, maka defisit anggarannya tidak boleh melebihi 2,2 persen. "Dalam APBD 2023 saat ini defisit 4,7 persen," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo Jumat (3/3).

Terkait perminraan pemerintah pusat untuk rasionalisasi anggaran sudah ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Sekretariat Daerah yang diberikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga untuk saat ini sudah dalam proses input kegiatan yang dirasionalisasi oleh masing-masing OPD. Meskipun demikian pemangkas dilakukan terhadap program kegiatan

yang belum dijalankan dan skemanya dengan penetapan skala prioritas.

Dengan rasionalisasi tidak lantas menghapus, tapi menunda dan bisa diusulkan kembali tahun anggaran berikutnya. "Permintaan pemerintah pusat untuk rasionalisasi anggaran tersebut kini sudah ditindaklanjuti," ujarnya.

Kepala Bidang Anggaran, BKAD Gunungkidul, Sujatmiko Nurhasan mengatakan, PMK No.193 mengharuskan pemkab melakukan penghematan anggaran tidak terlepas dari penilaian rasion fiskal Gunungkidul sebesar 1,267 atau masuk kategori rendah.

Karenanya, Pemerintah Pusat meminta Pemkab merasionalisasi anggaran sehingga defisit tidak boleh lebih dari 2,2 persen. Saat ini masih berlangsung dan batas akhir rasionalisasi kegiatan di OPD tertanggal 3 Maret 2023.

Meski proses rasionalisasi masih berlangsung, namun sudah membuat formulasi berkaitan dengan penghematan yang harus dilakukan.

(Bmp)

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.